

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang pada prosesnya memerlukan suatu indikator adanya masyarakat yang terdidik serta memiliki tingkat intelektualitas dalam arti terbentuknya warganegara yang sadar dan paham setiap terhadap kebijakan-kebijakan politik dan birokrasi pemerintah yang biasa disebut literasi politik. Dalam masyarakat yang melek politik merupakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas termasuk sadar akan berlakunya hukum serta memiliki kesadaran sosial.¹

Demokrasi kita hari ini memang telah memiliki lembaga-lembaga demokrasi, namun belum mampu membangun iklim demokrasi yang menyehatkan dan budaya demokrasi yang mapan. Demokrasi kita belum secara ideal berjalan secara substansial sebagaimana diharapkan. Demokrasi ideal dalam tataran praktisnya hanya akan mungkin terwujud apabila tingkat partisipasi pemilih yang memiliki kemampuan literasi yang baik berada pada tingkat persentase yang tinggi. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan menghasilkan sosok-sosok pejabat-pejabat terpilih yang memang memiliki jejak rekam (*track record*) yang jelas dan kemampuan yang mumpuni serta berkarakter.²

Kemampuan literasi politik bagi masyarakat adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Literasi politik bukan hanya sekedar paham tentang mekanisme pemilihan saja, namun juga harus mampu menyadari

¹ Crick dan Porter, Tristan McCowan, *Rethinking Citizenship Education: A Curriculum for Participatory Democracy*, (Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 1973) h.31

² Muhamad Ridha, "Literasi Politik dan Masa Depan Demokrasi" dalam *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin* (4 Februari 2021) h.1

dampak apa yang akan diperoleh saat menjatuhkan pilihan. Kemampuan untuk menganalisis beragam jejak rekam para calon dan kemampuan untuk menakar potensi realisasi serta manfaat dan mudharat setiap program kerja yang ditawarkan/dijanjikan calon merupakan hal yang mendasar bagi pemilih. Bahkan pada tingkat idealnya harus mampu memahami dinamika politik yang terjadi baik ditingkat lokal maupun nasional.³

Mobilitas politik santri mulai memasuki golongan politik secara historis dan ideologis, berbeda bahkan bertentangan. Kriteria santri tidak hanya terbatas pada hubungan dengan salah satu golongan politik, akan tetapi secara luas berhubungan dengan semua golongan politik. Politik santri melalui partai Islam ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pemeluk Islam sesuai dengan jumlahnya yang mayoritas. Hal ini menarik jika dihubungkan dengan konsep dan cita-cita perjuangan Islam golongan santri yang ternyata tidak memperoleh dukungan mayoritas pemeluk Islam sendiri, sebagian di antara elit santri justru memberikan dukungan kepada partai non Islam⁴

Sumber daya manusia yang unggul akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Indonesia yang multikultural membuat beraneka ragam suku, ras, budaya, termasuk lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yakni lembaga formal seperti sekolah, dan lembaga non-formal seperti pondok pesantren. Pondok pesantren tumbuh subur di Indonesia dan menjamur ke seluruh penjuru nusantara. Tidak hanya itu, sistem pondok pesantren berkembang mulai dari salafiah (tradisional) dan modern. Keberadaan pondok pesantren amatlah penting, memberikan

³ Muhamad Ridha, “Literasi Politik dan Masa Depan Demokrasi” dalam *Jurna; UIN Antasari Banjarmasin* (4 Februari 2021), h.1

⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (PT Bina Ilmu Suranaya, 1994) h.8

kontribusi besar terhadap masyarakat dalam menciptakan pendidikan karakter dan khazanah keagamaan⁵

Adapun pengertian literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berpartisipasi secara aktif dan efektif, kritis, bertanggung jawab yang dapat memengaruhi urusan pemerintahan di semua tingkatan.⁶

Pada akhirnya bermuara kepada terbentuknya masyarakat madani (*civil society*). berdasarkan kepada Pancasila, norma, dan etika yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai kearifan lokal pun ditanamkan dalam dalam memperkaya wawasan, pemahaman, dan memperkuat semangat cinta tanah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Tiga kompetensi dasar dari pendidikan kewarganegaraan antara lain; (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), (2) sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan (3) keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan membekali masyarakat dengan sejumlah pengetahuan yang menjadi dasar sebagai warga negara yang cerdas, kritis, demokratis, menghormati HAM, taat hukum, mengetahui hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, mengetahui peran lembaga-lembaga negara, dan sebagainya.⁷

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka mata pendidikan literasi politik dengan mengetahui ketatanegaraan sangat strategis dalam membangun karakter bangsa. Sejalan dengan prinsip pengembangan masyarakat Islam yaitu: (1) religius, (2) nasionalis, (3) integritas, (4) mandiri,

⁵F In'amurrohman, "Kesyubhatan TIK: Sisi Gelap Dan Terang Penggunaan TIK Pada Literasi Digital Pondok Pesantren" dalam *Jurnal Teknik Elektromedik Indonesia* (2019). h.1

⁶ Nurudin Cahyadi, "Membangun Literasi" <https://disdik.purwakartakab.go.id/membangun-literasi--?/membangun-literasi>. Diakses Pada 1 Feb. 2021 Pukul. 11:00 WIB

⁷ Sulistyowati, E. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), h. 1-12.

dan (5) gotong royong. Proklamator kemerdekaan RI pascakemerdekaan menekankan tentang pentingnya *nation and character building*. Negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina sangat bisa maju dengan pesat dan menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia karena memiliki karakter kuat.⁸

Orientasi politik ini memiliki tujuan untuk mengarahkan partisipasi politik santri, karena santri memiliki potensi yang sangat besar dalam mengumpulkan hak suara oleh partai politik. Orientasi mencakup orientasi kognitif, afektif dan evaluatif. Orientasi kognitif ini berhubungan dengan santri sebagai pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Orientasi afektif ini berkaitan dengan sikap santri sebagai pemilih dalam pemilihan umum 2019. Sedangkan orientasi evaluatif ini berhubungan dengan keputusan atau pilihan politik santri sebagai pemilih dalam pemilihan umum 2019. Sehingga memunculkan kesadaran politik para santri pada pemilihan umum 2019.⁹

Orientasi kognitif merupakan suatu pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentang kepercayaan pada politik dan segala kewajibannya untuk menilai tentang pemilihan umum. Terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Sejalan dengan pendapat Almond dan Powell juga mengungkapkan tiga orientasi politik perbedaannya hanya memasukan aspek perasaan senang atau tidak senang terhadap objek politik. Untuk orientasi kognitif pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi kognitifnya berupa pengetahuan dan pemahaman responden tentang pemilu.

⁸ Sutopo, A., & Istiqomah. "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2019) h. 9-12.

⁹ Gabriel Almond, *Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara)* Jakarta: Bumi Aksara 1990), h13

Tabel 1.1 Orientaasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Orientasi Kognitif Berdasarkan Tema		Kategori Jawaban			
			SP	P	KP	TP
1	Pengetahuan tentang pemilu	Arti Penting pemilu	4 (4%)	18 (21%)	30 (35%)	35 (40%)
		Waktu Penyelenggara pemilu	60 (69%)	17 (20%)	10 (11%)	-
		Asas Pemilu	10 (11%)	24 (28%)	17 (19%)	38 (42%)
2	Pengetahuan tentang kontestan dan peserta pemilu		7 (8%)	15 (17%)	35 (40%)	30 (35%)
3	Pengetahuan tentang kampanye		11 (13%)	36 (41%)	25 (29%)	15 (17%)
4	Badan penyelenggaraan pemilu		7 (9%)	35 (40%)	35 (40%)	10 (11%)

Sumber : Ronnie Farzianto, Al Rafni, *Orientasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, (Journal of Civic Education) 2020.

ditinjau dari Orientasi Kognitif Berdasarkan data tabel 1 dapat dikatakan bahwa secara umum bahwa orientasi politik santri terhadap pemilu masih kurang. Namun secara khusus per tema tertentu santri juga memiliki pemahaman yang luas atau sangat paham. Dari pertanyaan yang dikemukakan berupa pengetahuan tentang pemilu yang dikelompokkan atas arti penting pemilu, waktu penyelenggaraan pemilu, dan asas pemilu yang tergolong sebagai kategori berikut¹⁰

Selain sebagai sarana penguatan karakter, dapat menjadi sarana penumbuhan budaya literasi untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Kemdikbud yang melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan menyatakan bahwa "literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat

¹⁰ Ronnie Farzianto, Al Rafni, *Orientasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, (Journal of Civic Education) 2020, h.105

mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya."¹¹

Kaum santri memiliki catatan sejarah cukup panjang dan dinamis dalam dinamika politik nasional paska kemerdekaan, atau selama kolonial. Dinamika kaum santri dalam peta sosial politik nasional hampir identik dengan dinamika Indonesia sebagai bangsa. Perubahan perilaku santri bisa menjadi petunjuk untuk melihat arah perubahan kebangsaan Indonesia. Karenanya, menjadi penting untuk tidak sekedar melihat, tetapi kemudian mendudukan peran politik santri di era reformasi saat ini.

Kehidupan politik di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh kiai, pesantren dan santri. Peran kiai dan pesantrennya telah tampak sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, pemberontakan PKI sampai sekarang ini. Keikutsertaan kiai dalam masalah-masalah yang menyangkut bangsa dan negara mulai tampak jelas dan terarah setelah berdirinya suatu organisasi yang menamakan dirinya sebagai kebangkilan ulama atau yang lebih populer dengan Nahdlatul Ulama (NU). NU yang mengambil bentuk kultural dalam menghadapi penjajah belanda merupakan sesuatu yang membedakan antara NU dengan gerakan-gerakan anti penjajahan yang lain yang kebanyakan sangat diwarnai oleh watak politiknya. Penolakan NU terhadap ordanansi guru dan ordonansi pencatatan perkawinan, menolak milisi untuk menghadapi Jepang dan menuntut Indonesia berparlemen merupakan peran NU dalam menghadapi kenyataan bahwa Belanda banyak melakukan tindakan yang mengganggu prinsip dari kehidupan bangsa dan agama¹².

Perkembangan NU dapat dibagi menjadi enam periode. Pada periode awal yaitu sejak berdirinya NU dari tahun 1926 sampai dengan tahun 1946, NU hanya memfokuskan pada organisasi sosial keagamaan, sedangkan dalam

¹¹ Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan.

¹² Slamet Effendy Yusuf , *Dinamika Kaum Santri*, (CV. Rajawali, Jakarta 1983), h. 35

bidang politik, NU belum begitu banyak terlibat. Periode kedua antara tahun 1946 sampai tahun 1952, di samping NU sebagai organisasi sosial keagamaan, NU juga menjadi salah satu penopang dari sebuah partai Islam: Masyumi. Pada periode ketiga antara tahun 1952 sampai 1973, NU mengubah dirinya menjadi partai politik. Periode keempat (1973-1984), NU menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada periode kelima, antara tahun 1984 sampai tahun 1998 NU tidak lagi menjadi penopang PPP, karena pada muktamar NU ke-27 telah ditetapkan bahwa NU kembali ke khittah 1926. Pada periode keenam, dimulai pada paruh kedua tahun 1998, NU tetap berfungsi sebagai organisasi sosial keagamaan dan di saat yang sama melahirkan secara resmi partai kaum Nahdliyyin yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa¹³.

Pada masa pemerintahan Orde Baru tepatnya pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Akibat krisis ekonomi tersebut menyebabkan rakyat Indonesia semakin mengerti apa sesungguhnya yang terjadi dikalangan elit Pemerintahan. Semakin menguaknya keburukan-keburukan pemerintah menyebabkan pemerintah kehilangan wibawa dan kekuatan. Pada saat Pemerintah berada pada posisi yang kurang menguntungkan tersebut, daya tawar masyarakat semakin meningkat seiring dengan bergulirnya isu global seperti demokratisasi, desentralisasi, HAM, gender dan isu lingkungan¹⁴.

Pada tanggal 23 Juli 1998 bertempat di kediaman KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur, Jakarta Selatan, sejarah politik Indonesia modern menyaksikan kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari rahim komunitas NU yang kelahirannya dibidani oleh para kiai yaitu: KH Ilyas Rukhiyat, KH Munasir Ali, K.H. Mustofa Bisri, KH Muchit Muzadi, dan KH

¹³ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 1998, h.56.

¹⁴ Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002), h.2

Abdurrahman Wahid¹⁵. Strategi dan taktik perjuangan politik NU tidak dapat dipisahkan dari pengaruh yang kuat dari pesantren –dalam arti konservatisme, suatu budaya warisan Islam klasik yang sering mendorong kelompok ini. Memang NU sering dilukiskan sebagai pesantren dalam politik. Ini artinya bahwa peran kiai dalam partai ini demikian besar, hingga hampir-hampir tanpa batas.

Perkumpulan Nahdlatul Ulama seperti yang kita kenal sekarang ini adalah pewaris dan penerus tradisi kiai. NU telah mampu mengembangkan suatu organisasi yang stabilitasnya sangat mengagumkan, walaupun ia sering menghadapi tantangan yang cukup berat. Modal utamanya adalah para kiai yang memiliki perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi serta selalu menghormati tradisi. Rahasia suatu keberhasilan kiai dalam mengembangkan sistem organisasi yang kuat dan stabil itu terletak pada kebijaksanaan dan kesadaran mereka bahwa struktur sosial manapun haruslah mempercayai *General Consensus*, bukannya mempercayakan atau menggantungkan persetujuan yang dipaksakan atau sistem organisasi yang rumit¹⁶.

Untuk itu workshop parlemen santri ini hadir untuk bersama-sama mengembangkan nalar politik untuk masyarakat khususnya santri karena pengembangan literasi politik ini sangatlah dibutuhkan oleh kalangan santri pada saat ini agar santri tidak hanya menjadi massa pada pergulatan pemilu saja namun dapat mengetahui makna dan substansi dari peran santri untuk bangsa ini. Mengubah distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga kekuasaan ini dapat dibagi lebih adil merupakan satu tujuan pengembangan politik. Tujuan lainnya yaitu untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi lebih efektif dalam arena yang lebih luas. Mengingat bahwa orang-orang dapat diperdaya dalam masyarakat mereka, masyarakat dapat juga diperdaya dalam lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, analisis

¹⁵ Amir Zaenal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta 2003), h.113.

¹⁶ Abdul Ghofur, *Demokratisasi*, (Ciputat Press, Jakarta 2002), h.66

kekuasaan harus mencakup dalam masyarakat itu sendiri yang terkait dengan masyarakat lain dan institusi lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya kekuasaan dalam masyarakat yang terletak pada kebutuhan terpenting untuk pengembangan masyarakat, dan pengembangan politik merupakan komponen penting dari strategi pengembangan masyarakat¹⁷

Kriteria santri tidak hanya terbatas pada hubungan dengan salah satu golongan politik, akan tetapi secara luas berhubungan dengan semua golongan politik. Politik santri melalui partai Islam ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pemeluk Islam sesuai dengan jumlahnya yang mayoritas. Membuat FPKB DPR RI memberikan solusi jalan keluar yang diberikan untuk santri yang ada di Indonesia ini memberikan manfaat untuk santri yang ada di Indonesia yang mana santri di Indonesia sudah menjadi barang tentu bermanfaat sekali tentang edukasi Literasi Politik ini bagi santri ada beberapa hal yang didapatkan santri yang mengikuti Workshop ini, peserta yang dari berbagai tempat di khususnya di pulau Jawa ini memberikan ruang bagi santri berekspresi dan memberikan sarana praktek secara langsung di parlemen dan menngertahui penting nya Literasi Politik untuk mereka.¹⁸ Hal ini menarik jika dihubungkan dengan konsep dan cita-cita perjuangan Islam golongan santri yang ternyata tidak memperoleh dukungan mayoritas pemeluk Islam sendiri, sebagian diantara elit santri justru memberikan dukungan kepada partai non Islam¹⁹.

Beranjak dari pemikiran tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI berinisiatif untuk memberikan pendidikan politik kenegaraan bagi kalangan santri, agar sebagai parameter kebangkitan politik masyarakat

¹⁷ Jim Ife dan Frank Teseriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta 2016) h.437

¹⁸ H. Hernu, Kepala Sekretariat Fraksi PKB DPR RI, Wawancara mengenai Manfaat, Tujuan serta Sasaran Program Workhsop Parlemen Santri FPKB, di Kantornya, 20 Oktober 2020.

¹⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (PT Bina Ilmu, Surabaya 1994), h.8

santri yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia nantinya terwarnai dengan nalar politik kebangsaan dan kenegaraan yang benar.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Melalui Program Parlemen Santri” (Studi Deskripsi Tentang Pemberdayaan Santri Bidang Literasi Politik)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana program Parlemen Santri dalam Pemberdayaan Literasi Politik
2. Apa Peran Program Parlemen Santri DPR-RI FPKB dalam Pemberdayaan Literasi Politik bagi Santri ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kegiatan Pemberdayaan Literasi Politik Santri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengaju kepada permasalahan yang dijabarkan di atas, maka tujuan yang ingin di capai adalah :

1. Untuk Mengetahui program Parlemen Santri dalam Pemberdayaan Literasi Politik Santri.
2. Untuk Mengetahui peran Program Parlemen Santri DPR-RI FPKB dalam pemberdayaan Literasi Politik bagi Santri.
3. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan Pemberdayaan Literasi Politik Santri.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap Literasi Politik Santri yang dilakukan DPR-RI FPKB dalam pengembangan literasi Politik Santri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada :

a. Bagi Peneliti

Agar penulis atau penelti dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta refrensi peneliti selanjutnya. Selain itu, dapat memberikan masukan kepada FPKB DPR-RI Workshop Parlemen Santri selaku pelaksana program Pengembangan Literasi Politik Santri untuk menjadi lebih baik.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satubahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di kalangan UIN SMH Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi refrensi ajuan saya dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu ini juga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah berupa skripsi dan artikel di jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan:

Pertama, skripsi Bakhtiar Rosadi (2019), yang berjudul “Pengaruh Kampanye Politik Melalui Media Sosial Terhadap Peningkatan Literasi Politik Generasi Milenial” di Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia²⁰. Kesimpulan yang di dapatkan dari skripsi tersebut adalah rendahnya minat dan literasi politik generasi milenial disebabkan karena persepsi buruk mereka terhadap politik.

Citra buruk politik tersebut dibangun atas dasar pandangan mengenai permasalahan-permasalahan partai politik, seperti “buruknya manajemen partai, rekrutmen calon kader dan calon pejabat publik yang cenderung bersifat transaksional pragmatis, banyaknya kasus Korupsi Kolusi Nepotisme serta kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsifungsinya yang di antaranya adalah fungsi komunikasi politik dan pendidikan politik”. Pandangan buruk tersebut menurunkan kepercayaan mereka terhadap politik sehingga berakibat terhadap minat dan literasi politiknya.

Media sosial banyak digunakan sebagai alat kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum di era sekarang. Masing-masing peserta pemilu berlomba mencuri minat dan perhatian pengguna media sosial dengan saling adu kreatif menciptakan konten-konten politik dengan kemasan yang lebih *up to date*.

Selain bertujuan untuk meraup suara politik, hal tersebut juga mampu meningkatkan minat dan literasi politik generasi milenial dibanding dengan kegiatan kampanye secara konvensional. Sedangkan perbedaan yang d tulis oleh Bakhtiar Rosadi adalah lebih kepada konten politik digital yang *up to date* dan studi penelitian.

Sedangkan yang saya teliti lebih kepada Literasi Politik melalui Workshop Literasi Politik pada FPKB DPR-RI

²⁰ Bakhtiar Rosadi, “*Pengaruh Kampanye Politik Melalui Media Sosial Terhadap Peningkatan Literasi Politik Generasi Milenial*” (Skripsi Sarjana “Universitas Pendidikan Indonesia”, Bandung 2019)

Kedua, skripsi Mohamad Firman Hadi (2019), yang berjudul “Analisis Kajian Literasi Politik Pada Channel Youtube Asumsi” di Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah²¹. Dapat disimpulkan bahwa dari skripsi tersebut adalah menemukan unsur literasi politik berdasarkan analisis kuantitatif deskriptif, penulis menyimpulkan bahwa konten-konten yang dibawakan oleh Asumsi pada playlist Youtube mereka menggunakan cara dan strategi yang dapat di Youtube. Karena platform ini paling sering digunakan untuk hiburan dan asumsi mengambil langkah yang benar membawa literasi politik ke ranah ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mohamad Firman Hadi yaitu berdasarkan studi kasus dan objek yang diteliti, yang menjadi bahan penelitian saya mengenai literasi Politik yakni menjadikan studi kasus FPKB DPR-RI sebagai bahan objek kajian dan penelitian yang saya lakukan, penelitian saya ini melakukan riset objek Pengembangan Masyarakat Islam melalui kajian wawasan untuk santri-santri pondok pesantren agar dapat mengetahui tugas dan fungsi lembaga tinggi negara baik Legislatif dan Eksekutif.

Ketiga artikel jurnal yang ditulis Agus Sutisna (2017) yang berjudul “Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual” di Universitas Muhammadiyah Tangerang.²² Kesimpulan yang didapatkan dari artikel jurnal tersebut Pemilu berkualitas yang menjadi salah satu prasyarat hadirnya kehidupan politik yang demokratis membutuhkan prakondisi adanya para pemilih yang literate (melek) secara politik, yang memungkinkan partisipasi pemilih bukan saja tinggi secara kuantitas, melainkan juga bermutu derajat kualitasnya.

²¹ Mohamad Firman Hadi, “Analisis Kajian Literasi Politik Pada Channel Youtube Asumsi” di Jakarta, (Skripsi Sarjana “UIN Syarif Hidayatullah”, Jakarta 2019)

²² Agus Sutisna, “Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2 Universitas Muhammadiyah Tangerang. (Oktober 2023)

Pembelajaran kontekstual adalah suatu model pembelajaran yang menghubungkan materi belajar dengan konteks atau situasi riil (nyata). Model pembelajaran ini lebih efektif dan produktif karena, selain dilakukan dengan ragam metode yang memberdayakan, mendorong kemandirian, memicu daya kritis dan menumbuhkan kreatifitas peserta didik, juga berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang (selama menjadi siswa). Melalui model pembelajaran kontekstual ini mereka dipersiapkan secara lebih matang untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, rasional dan bertanggung jawab.

Penelitian ini di atas mengkaji mengenai peran peningkatan Literasi Politik melalui Pembelajaran Kontekstual yang artinya peneliti melakukan dengan objek penelitian melalui kontekstual. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang objek penelitiannya dengan situasi dan arena yang riil (nyata) terjadi dan ada kasus yang menjadi objek penelitian saya, sehingga objek penelitian ini akan bermanfaat masukan kedepan nya untuk FPKB DPR-RI dan Masyarakat secara luas.

F. Kerangka Teori

1. Literasi

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin *littera* (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Manakala berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak lepas dari pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendiri merupakan bagian dari budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunya harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosial budayanya. Berkenaan dengan ini Kern

mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut²³:

Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/ tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana.

Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural.²⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa literasi memerlukan kemampuan yang kompleks. Adapun pengetahuan tentang *genre* adalah pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku/ digunakan dalam komunitas wacana misalnya, teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain. Terdapat tujuh unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan dengan interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi.

2. Literasi Politik

Literasi politik diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membuat seorang pria maupun wanita baik secara melek politik dan mampu menerapkan dalam dunia perpolitikan. Adapun pengertian literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berpartisipasi secara aktif dan efektif, kritis, bertanggung jawab yang dapat memengaruhi urusan pemerintahan di semua tingkatan.

²³ Hermawan, A. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dalam Membangun Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 117-131.

²⁴ Ricard Kern, *Literacy and Language Teaching*, (Oxford University Press, New York 2000), h.16

Negara kita Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang pada prosesnya memerlukan suatu indikator adanya masyarakat yang terdidik serta memiliki tingkat intelektualitas dalam arti terbentuknya warganegara yang sadar dan paham setiap terhadap kebijakan-kebijakan politik dan birokrasi pemerintah yang biasa disebut literasi politik. Dalam masyarakat yang melek politik merupakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas termasuk sadar akan berlakunya hukum serta memiliki kesadaran sosial.²⁵

Tujuannya adalah untuk membentuk suatu kebiasaan masyarakat atau dalam kalangan santri untuk berpikir kritis dalam memanfaatkan perannya sebagai warga negara, termasuk ketika masyarakat hal ini yakni santri akan menjumpai dunia pemerintahan. Literasi politik menjadi bahan pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam lingkup pendidikan dan sekolah atau pesantren untuk menjadi sarana tepat dalam menyalurkan pengetahuan dan pemahaman terhadap politik melalui program yang terkonsep dalam pengembangan literasi politik dan memuat unsur-unsur materi tentang literasi politik secara seimbang dan proposional. Selain itu, literasi politik harus mampu memberikan peluang maupun kesempatan dalam mengajarkan santri untuk mampu berpartisipasi secara aktif dalam politik. Seseorang melek politik akan tahu perselisihan tentang politik terutama keyakinan yang mereka miliki dapat mempengaruhi orang lain, serta menghormati keputusan orang lain.

Untuk meningkatkan partisipasi politik serta menyiapkan generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sipil dan publik dan disamping itu pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan utama yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara,

²⁵ Crick dan Porter, Tristan McCowan, *Rethinking Citizenship Education: A Curriculum for Participatory Democracy*, (Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 1973) h.31

serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Peran kewarganegaraan pun cukup penting untuk keberlangsungan bangsa dengan menambah wawasan dan pengetahuan kewarganegaraan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.²⁶

Teori pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi menekankan pada pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan perwujudan inklusi sosial dalam proses pemberdayaan. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat memiliki potensi dan kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri. Bantuan dari pihak luar hanya diperlukan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam teori ini meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁷

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

²⁷ Susilo, E., & Setyawati, W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi: Konsep dan Implementasinya. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 12(1), h. 1-12.

Perwujudan inklusi sosial dalam teori ini meliputi pengurangan kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan secara adil.²⁸

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.²⁹

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton

²⁸ Wijayanti, R., & Nursalam, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi: Studi Kasus Desa Wisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), h. 1-10.

²⁹ Macionis, J. J., & Gerber, P. A. (2023). *Pengantar antropologi: Menjelajahi Keanekaragaman Budaya Manusia*. Pearson Education, Inc. h. 158

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

4. Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan masyarakat Islam (Islamic Community Empowerment) merupakan sebuah bentuk dakwah dengan sasaran semakin terberdayakan potensipotensi yang ada di masyarakat. Secara implementatif untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan teoritik yang mapan, sebuah perangkat konseptual dan operasional yang dapat diaplikasikan.³⁰ Pertama sasaran pengembangan perlu diperjelas, apa saja faktor-faktor yang ada di masyarakat dan dipandang mampu mengangkat kualitas kehidupan dan kesejahteraan, setelah itu apa strateginya, pelakunya harus siapa, bagaimana pencapaiannya serta apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian itu.³¹

Jika menilik pada perangkat mekanis dan teknis dari pengembangan ini, maka tampaknya program ini diakui masih perlu usaha dan kerja keras para

³⁰ Idrus, M. A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Islam: Konsep dan Implementasi*. PT Raja Grafindo Persada. h. 12

³¹ Ali, M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Islam: Perspektif Islam dan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. h. 23

ahli, peneliti dan ilmuwan di bidang relevan untuk melakukan kajian-kajian yang bersifat intensif terutama dengan memanfaatkan teori-teori yang sudah banyak berkembang pada disiplin ilmu sosial lain (melakukan Iqtibas).³²

Misalnya ada banyak ilmu yang relevan dari ilmu-ilmu dasar seperti sosiologi dan psikologi maupun ilmu sosial lain seperti ekonomi, politik dan humaniora. Sedangkan apabila menilik pada asal muasal lahirnya bidang ini (pengembangan masyarakat Islam), tidak bisa dipisahkan dengan dakwah.

Dakwah memiliki sasaran yang beragam bukan hanya dari jenis perkembangan masalah yang terjadi pada lingkup individual akan tetapi juga membidikan sasarannya pada masyarakat secara umum, bahkan dalam perkembangannya ilmu dakwah menjelaskan adanya 6 konteks sasaran/ mad'u yang digarap oleh dakwah yaitu dari mulai diri sendiri (*da'wah an-nafsiyah*), antar perseorangan (*da'wah al-fardiyyah*), sasaran kelompok (*da'wah al-fi'ah*), organisasi (*da'wah al-hijbiyah*), antar etnik (*da'wah as-syu'ubiyah wa qobailiyyah*), komunitas massal (*da'wah al-ummah*).³³

Dengan demikian pengembangan masyarakat Islam termasuk di dalamnya dan bentuk dakwah ini dinamakan juga dengan attackwir Dakwah dalam perspektif ilmu dakwah, bentuknya dapat dibagi pada empat bentuk, yaitu: (1) tabligh Islam, sebagai upaya penerangan dan penyebaran pesan Islam; (2) irsyad Islam, sebagai upaya bimbingan dan penyuluhan Islam; (3) tadbir Islam, sebagai upaya pemberdayaan ummat dalam menjalankan ajaran Islam melalui lembaga-lembaga dakwah; dan (4) tathwir Islam, sebagai upaya pemberdayaan atau pengembangan masyarakat Islam. Berdasarkan pada pembagian bentuk-bentuk dakwah di atas maka Pengembangan Masyarakat Islam termasuk dalam kategori bentuk dakwah Tamkîn/tathwîr Islam, didalamnya berisikan pemberdayaan SDI (Sumber Daya Insani), lingkungan

³² Ali, M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Islam: Perspektif Islam dan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. h. 25

³³ Abdurrahman, M. (2022). *Pengembangan Masyarakat Islam: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 56

hidup, dan ekonomi umat, disebut pula sebagai Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).³⁴

5. Pengertian Santri

Pengertian Santri Menurut kamus, santri itu siswa dalam arti harfiah. Tapi, di dalam masyarakat yang didominasi orang-orang dengan bahasa ibu Bahasa Jawa, punya arti sendiri mengenai kata santri, yaitu *sanggup nerusaken tuntunan rasul Illahi. Kita harus sanggup meneruskan tuntunan rasul Ilahi*, itu lebih kurang artinya.³⁵ Santri adalah orang yang seluruh hidupnya berhubungan dengan agama. Tapi untuk mengetahui dengan benar dan tepat adalah dengan merasakan atau menjadi apa yang kita ingin tahu tersebut, minimal pernah melihat secara langsung³⁶ menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) santri secara formal disebutkan orang yang mendalam agama Islam; orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh; orang saleh Ada pula yang mengatakan berasal dari kata “cantrik” yang berarti para pembantu begawan atau resi, seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut.³⁷

Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdikan di pondok pesantren, sebagai konsekuensinya ketua pondok pesantren memberikan tunjangan kepada santri tersebut. Jadi dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa:

Pertama, Seseorang yang menuntut ilmu dengan niat mengharap ridho Allah.

Kedua, Seseorang yang kehidupannya ditentukan oleh masing-masing (akankah menjadi baik atau malah sebaliknya).

Ketiga, seseorang yang kehidupan sehari-harinya selalu terikat kuat dengan

³⁴ Mukhlis Aliyudin, “Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah”, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4 UIN SGD Bandung, (11 Desember 2020)

³⁵ Muhammad Khozin, *Santri Milenial*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018), h.3.

³⁶ Seno Teguh, *Ala Santri*, (Jakarta : Wahyu Qolbu, 2017), h.2

³⁷ Tito Naufal Ghifary, *SANTRI The Largest Sarungan Community*, (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2014), h.4

nilai-nilai agama (Islam)

Keempat, Seseorang yang ilmu agamanya mahir di bandingkan dengan anak seumuran (yang tidak nyantri).

Kelima, Seseorang yang Akhlak, Sikap, Pemahamannya terpuji. Mungkin jika dijabarkan akan lebih banyak lagi kesimpulannya. Namun, 5 kesimpulan diatas merupakan hal-hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang santri. Apabila salah satunya tidak dimiliki, maka tidak sah disebut sebagai santri yang hakiki /sejati.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁹

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Sekretariat Fraksi PKB DPR-RI, Di sini penulis melakukan penelitian terhadap pengembangan masyarakat yang di lakukan oleh Fraksi PKB DPR-RI dalam mengembangkan masyarakat melalui Literasi Politik untuk Santri. Penelitian ini di lakukan pada 26 Januari 2021-30 April 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

³⁸ Tito Naufal Ghifary, *Santri, The Largest Sarungan Community*,.....,h.5

³⁹ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), Cet.I, h.7.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁰ Dalam hal ini penelitian penulis langsung mengadakan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian, yaitu di Fraksi PKB DPR-RI.

b. Wawancara

Definisi wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴¹ Teknik wawancara yang di gunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang mendalam (*in-depth interview*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁴²

Adapun yang menjadi responden yaitu pengurus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Panitia Workshop, dan 5 orang santri di Provinsi Banten yang mengikuti Workshop Parlemen Santri tersebut. Saya mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Saya melakukan wawancara dengan merekam dan mencatat isi pembicaraan yang telah dicatat kemudian di analisis

⁴⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2013), cetakan pertama, h.8

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfa beta, 2015), cetakan ketujuh, h.310

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, h. 318

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian.⁴³

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari Workshop Parlemen Santri FPKB DPR-RI dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya adalah sebagai berikut.

1. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Beberapa teknik pengumpulan data primer ini adalah survei, observasi dan eksperimen.⁴⁴ Dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan wawancara. Sumber data ini diambil melalui wawancara.
2. Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder ini misalnya dari buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya.⁴⁵ Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku yang terkait dengan Workshop Parlemen Santri FPKB DPR-RI.

⁴³ Albi Anggito dan Johan Seiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) cetakan pertama, h.255

⁴⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.37.

⁴⁵ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*,....., h.37.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bogdan merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah analisis data Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.⁴⁷ Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, *pie card*, piktogram, dan sejenisnya.⁴⁸ Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai program workshop parlemen santri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, serta keberhasilan dari program tersebut.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h.332.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h.337

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h.339.

mendukung pada tahap pengumpulan data berikut.⁴⁹ Saya memberikan kesimpulan terhadap data yang sudah ada dan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh saya berasal dari kegiatan pengembangan literasi politik bagi santri, dengan melakukan pengamatan saat kegiatan tersebut berlangsung.

Setelah data terkumpul, kemudian di analisis agar masalah yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, masalah yang telah dianalisis lalu dijabarkan dan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Pembahasan penelitian terdiri dari 5 Bab, masing- masing bab terdiri dari sub-sub dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitain, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Profil Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

BAB III Peranan Parlemen Santri Untuk Literasi Politik Bagi Santri

BAB IV Manfaat Literasi Politik Bagi Santri

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*,.....h.343.